

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA*EVALUATION OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCIES AT THE NORTH SULAWESI PROVINCIAL COOPERATIVES AND SMES OFFICE*

Oleh:

Gita Esterlin M. Himber¹**Ventje Ilat²****Sherly Pinatik³**¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹gitahimber@student.unsrat.ac.id²ventje_ilat@unsrat.ac.id³sherlypinatik@unsrat.ac.id

Abstrak: Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di instansinya masing-masing setiap tahun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan cukup baik, dimana pencapaian besaran target atas indikator sasaran telah tercapai di atas 100 %, walaupun disatu sisi terdapat satu indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian.

Kata Kunci: evaluasi, akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah

Abstract: Every head of government agency is required to evaluate performance accountability in their respective agencies every year in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 88 of 2021. Performance accountability is a manifestation of the obligation of a government agency to be accountable for the success or failure of the implementation of programs and activities that Stakeholders have been mandated in order to achieve the organization's mission in a measurable manner with performance targets set forth through periodic accountability reports. This study aims to determine Performance Accountability in the North Sulawesi Provincial Office of Cooperatives and SMEs. The method used in this research is descriptive qualitative with interview and documentation data collection methods. The results of the study show that the performance accountability of the North Sulawesi Provincial Office of Cooperatives and SMEs can be said to be quite good, where the achievement of the target size for target indicators has been achieved above 100%, although on the one hand there is one indicator whose achievement needs attention.

Keywords: evaluation, performance accountability, government agencies

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan pembangunan menuju terciptanya pemerintahan yang baik, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di instansinya masing-masing setiap tahun. Good governance atau pemerintah yang bersih ditandai dengan tiga pilar utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan dan juga memudahkan setiap institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mencapai tujuan organisasi secara komprehensif, tentunya dibutuhkan perencanaan keuangan atau penyusunan anggaran selama periode tertentu untuk dapat menentukan besarnya dana yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang telah disusun oleh organisasi. Seluruh kegiatan dan program tersebut dibiayai dari APBN/APBD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah, Indrayono, dan Herlisnawati (2020) yang menyatakan bahwa hasil analisis dengan persentase pencapaian kinerja mendapatkan hasil untuk kinerja anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 94,28% untuk tahun 2019, dan pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi dengan pencapaian kinerja penerbitan KTP diperoleh persentase sebesar 100%, penerbitan akte kelahiran anak diperoleh persentase 102,28%, permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK diperoleh persentase 100% sehingga dikategorikan sangat baik. Londa (2022) menemukan kinerja pencapaian kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dikategorikan pada kelas/kriteria sangat baik. Wantah, Kalangi, dan Tangkuman (2020) menemukan bahwa dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan ada beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya dibawah rata-rata yaitu urusan pendidikan; pekerjaan umum; penataan ruang; otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; urusan pilihan ESDM. Ramadhania dan Novianty (2020) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan implementasi AKIP pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi memiliki akumulasi skor rata-rata sebesar 197,2 dan 205 dengan kriteria baik, serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan AKIP sebesar 77,1%.

Berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, masih diperhadapkan dengan beberapa masalah yaitu, 1) Bertambahnya jumlah koperasi aktif namun dibarengi dengan tingginya jumlah koperasi tidak aktif yaitu sebanyak 2.659 unit koperasi dari jumlah 6.381 unit Koperasi yang ada atau 41,67% dari total jumlah Koperasi di Sulawesi Utara 2) Target jumlah wirausaha baru yang belum mencapai target yaitu hanya sebanyak 855 orang dari target 1000 wirausaha baru. Anggaran APBD dan APBN pada Dinas di 15 Kabupaten/Kota yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM pada umumnya relatif kecil. Akumulasi dari permasalahan ini mengakibatkan tugas-tugas pembinaan Koperasi dan UKM menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hasil akuntabilitas kinerja terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pencapaian besaran target atas indikator sasaran telah berhasil namun perlu ditingkatkan lagi. Walaupun disatu sisi terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan pengemban amanat dan pemangku kepentingan sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui akuntabilitas kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Sujarweni, 2015:107). Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Menurut Sujarweni (2015:108), elemen pokok pengukuran kinerja terdiri atas:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Untuk mengukur kinerja yang perlu dilihat adalah elemen tujuan, sasaran dan strategi organisasi sektor publik.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja perlu indikator-indikator (penilaian kinerja secara tidak langsung, hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja) apa saja yang akan digunakan.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mengukur kinerja dengan cara mengukur seberapa besar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). Untuk mengukur kinerja dengan cara mengevaluasi kinerja dengan cara :
 - a. *Feedback*: yaitu seberapa pencapaian kinerja dijadikan dasar pengelola organisasi untuk perbaikan berikutnya.
 - b. Penilaian kemajuan organisasi: penilaian kinerja dilakukan setiap periode dengan penilaian berupa kriteria-kriteria. Jika pencapaiannya lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan maka perlu ditemukan sumber penyebabnya.
 - c. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas: pengukuran kinerja akan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan membantu menilai keberhasilan manajemen.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menggambarkan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam membuat LAKIP, instansi pemerintah harus dapat secara kuantitatif menentukan besaran kinerja yang dihasilkan, yaitu besaran dalam bentuk angka atau persentase. Penerimaan dari LAKIP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah terkait selama 1 tahun anggaran. Penyusunan LAKIP didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021

Penelitian Terdahulu

Penelitian Anggraini (2021) bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dan mengetahui kesesuaian antara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No 53 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 Sangat berhasil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017-2019 telah sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No 53 Tahun 2014 yaitu, 1)Perjanjian kerjanya sudah disusun oleh pimpinan SKPD, 2)Pelaporan kerjanya sudah disampaikan apabila tahun berjalan sudah habis masanya, 3)Reviu laporan kinerja sudah diriviu oleh oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Penelitian Fitriyah, Indrayono, dan Herlisnawati (2020) bertujuan untuk melihat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupate Bogor Tahun 2019.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Sampel yang dipilih menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian dengan teknik penelitian wawancara. Penelitian menggunakan analisis persentase pencapaian kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan persentase pencapaian kinerja mendapatkan hasil untuk kinerja anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 94,28% untuk tahun 2019, dan pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi dengan pencapaian kinerja penerbitan KTP diperoleh persentase sebesar 100%, penerbitan akte kelahiran anak diperoleh persentase 102,28%, permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK diperoleh persentase 100% sehingga dikategorikan sangat baik.

Penelitian Ramadhania dan Novianty (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dilakukan pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Kota Cimahi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data berupa analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Kepala SKPD dan pegawai Bagian Program dan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 54. Data kuesioner dianalisis menggunakan SPSS Versi 26 dengan melakukan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia dan implementasi AKIP pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi memiliki akumulasi skor rata-rata sebesar 197,2 dan 205 dengan kriteria baik, serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan AKIP sebesar 77,1%.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang terjadi di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur pada setiap tahapan penelitian.

Proses Analisis

Proses analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode analisis deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Membuat kesimpulan
6. Memberikan saran bagi instansi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sudarsono, selaku pegawai bagian perencanaan dan keuangan menjelaskan bahwa “Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja ini sebagai acuan untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di Dinas Koperasi. Contohnya indikator kinerja Kepala Dinas yaitu koperasi sehat, ukm naik

kelas. Koperasi sehat itu sehat kelembagaan, sehat keuangan, usaha berjalan, anggota koperasi aktif. UKM naik kelas itu usaha lebih maju, *go digital* dan mampu bersaing. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana pencapaian besaran target atas indikator sasaran telah tercapai di atas 100 %, walaupun ada beberapa indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian”.

Dengan demikian, maka capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Sasaran	Tahun 2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	72	105	2,9%
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM	1.883	172.220	182,92%
Jumlah Wirausaha Baru	Orang	1.000	855	-14,5%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Koperasi Aktif	60	57	57	63	55	834	72	105
UMKM	1445	1.523	1.523	3407	1.687	8.238	1.883	172.220
Wirausaha	1000	1.000	1.000	1410	1000	1770	1.000	855

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai indikator ketercapaian kinerja kedinasan, ditetapkanlah kategori dengan kriteria yang diatur sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja

Kategori Capaian Kinerja	Presentase Capaian	Jumlah Sasaran
Berhasil	≥ 100	2
Berhasil Namun Perlu Ditingkatkan	70 s.d. 99	1
Kurang Berhasil	50 s.d. 69	-
Tidak Berhasil	0 s.d. 49	-

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pembahasan

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mencapai tujuan organisasi secara komprehensif, tentunya dibutuhkan perencanaan keuangan atau penyusunan anggaran selama periode tertentu untuk dapat menentukan besarnya dana yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang telah disusun oleh organisasi. Seluruh kegiatan dan program tersebut dibiayai dari APBN/APBD. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara diketahui pertama hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana pencapaian besaran target atas indikator sasaran telah tercapai di atas 100 %, walaupun disatu sisi terdapat satu indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian, yaitu bertambahnya jumlah Koperasi Aktif tapi dibarengi dengan terjadinya jumlah Koperasi yang sudah aktif menjadi tidak aktif. Dalam perwujudan keterlaksanaan program dan ketercapaian akuntabilitas kinerja, ada factor penghambat dan juga factor pendukungnya. Faktor penghambat misalnya saat turun ke lapangan ada koperasi yang tidak aktif, otomatis itu jadi penghambat dalam mencapai indikator kinerja. Faktor pendukung misalnya pelaku usaha ada kemauan untuk berkembang. Dari dinas diadakan pelatihan pembina koperasi atau pelaku UKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adanya penurunan kinerja dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditandai dengan tingginya jumlah koperasi tidak aktif yaitu sebanyak 2.659 unit koperasi dari jumlah 6.381 unit koperasi yang ada. Walaupun capaian kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil karena bertambahnya jumlah koperasi aktif sebanyak 105 unit koperasi dari target yang ingin dicapai sebanyak 72 unit, namun perlu ditingkatkan karena ada koperasi yang dulunya aktif sekarang menjadi tidak aktif.
2. Berdasarkan indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada sebanyak 1000 target wirausaha baru yang ingin dicapai. Namun realisasinya hanya ada 855 wirausaha baru dari target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan kurangnya minat berwirausaha serta kemampuan keterampilan yang kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka peneliti memberikan saran bagi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. Lebih meningkatkan komitmen bersama dalam mencapai indikator kinerja agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik
2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dijadikan contoh bagi instansi vertikal lainnya karena secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik.
3. Lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan terkait dengan Badan Hukum Koperasi agar meminimalisir pendirian koperasi yang tidak serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W. (2021) Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. *Skripsi*. Politeknik Negeri Bengkalis. <http://eprints.polbeng.ac.id/1989/> . Diakses tanggal 22 Oktober 2022
- Fitriyah, N., Indrayono, Y., & Herlisnawati, D. (2020). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Akuntansi*, Vol. 8, No. 2. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1645>. Diakses tanggal 22 Oktober 2022.
- Londa, C. C. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42524>. Diakses tanggal 12 Januari 2023
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding 11th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, Vol. 11, No. 1. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2125> Diakses tanggal 17 Januari 2023

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Wantah, K. P., Kalangi, L., & Tangkuman, S. (2020). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 18, No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/29734/28802>. Diakses tanggal 12 Januari 2023

